

BAB I PENDAHULUAN

Laporan keuangan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Pemerintah Daerah sebagai entitas akuntansi merupakan salah satu bentuk akuntabilitas pengelolaan keuangan SKPD sekaligus sebagai sarana untuk menyajikan atau menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan baik aspek pendapatan, belanja, beban, aset, kewajiban maupun ekuitas SKPD yang akan dikonsolidasikan menjadi laporan keungan pemerintah daerah kabupaten Balangan tahun 2018. Laporan keuangan tersebut harus merupakansatu kesatuan yang terdiri dari laporan keuangan, catatan atas laporan keuangan, dan informasi tambahan yang harus disajikan bersama-sama

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) ini secara umum adalah untuk menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Balangan.

Sedangkan maksud dan tujuan secara khusus penyusunan laporan keuangan ini adalah untuk menyajikan informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Balangan dalam:

- a. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah;
- b. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah;
- c. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- d. Menyediakan infomasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
- e. Menyediakan informasi mengenai cara pemerintah daerah mendanai aktivitas dan memenuhi kebutuhan kas;
- f. Menyediakan infomasi mengenai potensi pemerintah daerah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan; dan

g. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan pemerintah daerah dalam mendanai aktivitasnya.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Landasan hukum penyusunan laporan keuangan adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- d. Undang Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
- e. Undang Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438;
- f. Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
- g. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);



- Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala
 Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran
 Negara Nomor 4027);
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan KeuanganDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139);
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan –
 Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi Pemerintahan (lampiran II);
- m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalan Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri 13
 Tahun 2006;
- o. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 21 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
- Peraturan Bupati Balangan Nomor 34 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati
 Balangan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Balangan
- q. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2018; (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2017 Nomor 11.) dan
- r. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2018; (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2018 Nomor 7)

1.3 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

BAB I Pendahuluan

- 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

BAB II. Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan

- 2.1. Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan
- 2.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

BAB III. Penjelasan pos-pos laporan keuangan

- 3.1 Rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan.
 - 3.1. Pendapatan LRA
 - 3.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 - 3.1.2 Belanja
 - 3.1.2.1. Belanja Operasi
 - 3.1.2.2. Belanja Modal
 - 3.2. Neraca
 - 3.2.1 Aset
 - 3.2.2 Kewajiban
 - 3.2.3. Ekuitas
 - 3.3 Pendapatan LO
 - 3.3.1. Beban
 - 3.3.2. Kegiatan Non Operasional
 - 3.4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
 - 3.4.1. Ekuitas Awal

- 3.4.2. Surplus/Defisit LO
- 3.4.3. Dampak kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar
- 3.4.5. Ekuitas Akhir.

BAB IV. PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN BAB V. PENUTUP.

BAB II

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD

2.1 Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan

Dari gambaran realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kecamatan Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2018 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1. Pendapatan dapat direalisasikan sebesar Rp. 0,- dari yang dianggarkan sebesar Rp. 1.000.000,- sehingga terdapat selisih lebih dari anggaran sebesar Rp. 1.000.000,-.
- 2. Belanja direalisasikan sebesar Rp. 2.947.216.593,- dari yang dianggarkan sebesar Rp.3.198.000.776,- sehingga terdapat selisih kurang dari anggaran sebesar Rp. 250.784.183,-.
 - a. Realisasi Belanja Operasi sebesar Rp. 2.880.361.893,- yang terdiri dari :
 - Realisasi belanja pegawai sebesar Rp. 1.270.279.362,- dibandingkan dengan anggaran sebesar Rp. 1.463.140.776,-
 - Realisasi belanja barang dan jasa sebesar Rp. 1.610.082.531,- dibandingkan dengan anggaran sebesar Rp. 1.667.950.000,-
 - Realisasi belanja bantuan sosial sebesar Rp. 0,00 dibandingkan dengan anggaran sebesar Rp.0,00
 - b. Realisasi Belanja Modal Sebesar Rp. 66.854.700,- yang terdiri dari :
 - Realisasi belanja modal peralatan dan mesin sebesar Rp. 44.396.000,- dibandingkan dengan anggaran sebesar Rp. 44.410.000,-
 - Realisasi belanja modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp. 15.000.000,- dibandingkan dengan anggaran sebesar Rp. 15.000.000,-
 - Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp. 7.458.700,- dibandingkan dengan anggaran sebesar Rp. 7.500.000,-

2.2. Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pemcapaian Target yang telah ditetapkan.

- a. Peraturan perundang-undangan yang selalu berubah menyebabkan laporan keuangan baik itu sistem maupun penatausahaan mengalami perubahan seiring dengan perkembangan perubahan tersebut. Reformasi terhadap perubahan tersebut berdampak kearah perbaikan pengelolaan keuangan daerah;
- Belum sempurnanya sistem komputerisasi laporan keuangan yang dapat menghasilkan laporan realisasi anggaran, laporan akhir tahun, laporan semesteran, laporan arus kas, dan neraca pada tahun 2018;
- c. Staf aparatur pada SKPD dan SKPKD yang berlatar pendidikan akuntansi masih minim; dan
- d. Pentingnya dukungan semua SKPD dan SKPKD bahwa dengan sistem pengelolaan keuangan yang didukung dengan sistem komputerisasi akan sangat membantu dalam menghasikan laporan keuangan daerah yang cepat, tepat, akurat dan akuntabel.

Solusi yang ditempuh:

- a. Mengadakan bimtek bagi bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan, dan pengelola keuangan bagi PPK di SKPD;
- Pada tahun yang akan datang diharapkan sistem komputerisasi laporan keuangan daerah baik dari SKPD dan SKPKD secara online sehingga laporan keuangan akan dapat diakses secara cepat, tepat waktu dan akurat;
- c. Melalui formasi penerimaan PNS berlatar pendidikan akuntansi dan pembinaan dari bidang akuntansi diharapkan masalah tentang penyusunan laporan keuangan dapat diatasi;
- d. Menumbuhkan tingkat kesadaran pentingnya sistem komputerisasi dan kerjasama dalam menginput data sesuai dengan tugas dan wewenang masing-masing baik dari perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan/ akuntansi; dan
- e. Melaksanakan rekonsiliasi laporan SKPD setiap bulannya, sehingga sistem tersebut dapat berjalan sebagaimana mestinya.

BAB III

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

3.1 PENDAPATAN – LRA

3.1.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Dari pendapatan asli daerah dengan anggaran Rp. 1.000.000,- dengan realisasi Rp. 0,- dengan prosentasi 0% dan mengalami penurunan dari tahun sebelumnya.

3.1.2. BELANJA.

Realisasi Belanja Daerah sebesar Rp 2.947.216.593,- dibandingkan anggaran sebesar Rp 3.198.000.776,- Atau terealisasi sebesar 92,16%. Realisasi belanja daerah ini berasal dari :

3.1.2.1. BELANJA OPERASI.

- a. Realisasi Belanja Operasi sebesar Rp. 2.880.361.893,- dibandingkan anggaran sebesar Rp. 3.131.090.776,- atau terealisasi sebesar 91,99%, yang terdiri dari :
 - 1). Realisasi Belanja Pegawai sebesar Rp. 1.270.279.362,- dibandingkan anggaran sebesar Rp. 1.463.140.776,- atau terealisasi sebesar 86,82%
 - 2). Realisasi Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 1.610.082.531,- dibandingkan anggaran sebesar Rp. 1.667.950.000,- atau terealisasi sebesar 96,53%
 - 3). Realisasi Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp. 0,00 dibandingkan anggaran sebesar Rp. 0,00 atau terealisasi sebesar 00,00%

3.1.2.2 BELANJA MODAL.

Realisasi Belanja Modal sebesar Rp. 66.854.700,- dibandingkan anggaran sebesar Rp. 66.910.000,- atau terealisasi sebesar 99,92%, terdiri dari :

- Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp. 44.396.000,dibandingkan anggaran sebesar Rp. 44.410.000,- atau terealisasi sebesar 99,97%
- 2). Realisasi Belanja Modal Gedung dan bangunan sebesar Rp. 15.000.000,dibandingkan anggaran sebesar Rp. 15.000.000,- atau terealisasi sebesar 100%
- Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp.7.458.700,dibandingkan anggaran sebesar Rp.7.500.000,- atau terealisasi sebesar 99,45%

3.2. NERACA

3.2.1. ASET

| | 31 Desember 2018 | 31 Desember 2017 |
|-----------------------------|------------------|------------------|
| | (Rp) | (Rp) |
| Kas di Bendahara Penerimaan | 0,00 | 0,00 |

Merupakan seluruh kas yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan dari Bendahara Penerimaan yang bersangkutan per 31 Desember 2018. Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00

| | 31 Desember 2018 | 31 Desember 2017 |
|------------------------------|------------------|------------------|
| | (Rp) | (Rp) |
| Kas di Bendahara Pengeluaran | 0,00 | 0,00 |

Merupakan kas yang menjadi tanggung jawab/dikelola oleh Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa uang persediaan yang belum disetor ke kas daerah per 31 Desember 2018. Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp 0,00 yang terdiri dari Kas Tunai sebesar Rp.00,-, Kas di Bank sebesar Rp.0,-, Pajak yang belum disetor sebesar Rp.0,- dan 2017 Rp. 0,00.

| | 31 Desember 2018 | 31 Desember 2017 |
|---------------|------------------|------------------|
| | (Rp) | (Rp) |
| Kas Lain-lain | 0,00 | 0,00 |

Merupakan saldo kas lain-lain selain Kas Daerah per 31 Desember 2018 dan 2017 sebesar Rp0,00 dan Rp0,00

| | 31 Desember 2018 | 31 Desember 2017 |
|---------------|------------------|------------------|
| | (Rp) | (Rp) |
| Piutang Pajak | 0,00 | 0,00 |

Merupakan saldo piutang sesuai Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang belum tertagih. Saldo piutang pajak per tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 adalah Rp0.00 dan Rp0 (nihil).

| | 31 Desember 2018 | 31 Desember 2017 |
|-------------------|------------------|------------------|
| | (Rp) | (Rp) |
| Piutang Retribusi | 0,00 | 0,00 |

Merupakan saldo piutang Surat Ketetapan Retribusi (SKR) yang belum tertagih. Saldo piutang retribusi per tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 adalah Nol (nihil).

| | 31 Desember 2018 | 31 Desember 2017 |
|-------------------------|------------------|------------------|
| | (Rp) | (Rp) |
| Piutang Dana Bagi Hasil | 0,00 | 0,00 |

Merupakan piutang atas Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan Pemerintah Pusat per 31 Desember 2018 dan 2017, dengan rincian sebagai berikut:

Persediaan

Merupakan saldo persediaan yang dikuasai oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan. Persediaan tersebut bersifat habis pakai dan diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten Balangan sebesar Rp.0,00, serta barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan masyarakat yang masih berada di SKPD sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

562.000,-

947.400,-

31 Desember 2018 31 Desember 2017
(Rp) (Rp)

Aset Lancar Lainnya 0,00 0,00

Merupakan saldo Aset Lancar per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp 0,00 dan per 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp0,00

31 Desember 2018 31 Desember 2017
(Rp) (Rp)

Jumlah Aset Lancar 0,- 947.500,-

Jumlah Aset Lancar per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp. 0,- sedangkan jumlah Aset Lancar per 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp. 947.500,-

| 31 Desember 2018 | 31 Desember 2017 | (Rp) | (Rp) | (Rp) | 0,00

Jumlah Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp0,00 sedangkan Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp0,00 adalah total Penyertaan Modal pada:

| | 31 Desember 2018 | 31 Desember 2017 |
|------------------------|------------------|------------------|
| | (Rp) | (Rp) |
| Investasi Non Permanen | 0,00 | 0,00 |

Merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp0,00 sedangkan Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp0,00

| | 31 Desember 2018 | 31 Desember 2017 |
|--------------------|------------------|------------------|
| | (Rp) | (Rp) |
| Investasi Permanen | 0,00 | 0,00 |

Merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. per 30Juni 2018 adalah sebesar Rp0,00 sedangkan Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp0,00.

Merupakan nilai tanah pada posisi per 31 Desember 2018 dan 2017, masing- masing adalah sebesar Rp.698.376.000,00 dan Rp. 698.376.000,00 dengan perhitungan sebagai berikut:

| Uraian | 31 Desember 2018 (Rp) |
|----------------------------------|--------------------------|
| Saldo Tanah s/d Tahun 2017 | 698.376.000,00 |
| - Koreksi tambah Saldo Awal | - |
| - Koreksi kurang Saldo Awal | - |
| Mutasi Tanah Tahun 2018 | - |
| - Belanja Modal | 0 |
| - Koreksi | - |
| Saldo Akhir per 31 Desember 2018 | 698.376.000,00 |

Realisasi penambahan tanah selama Tahun 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebesar Rp.0,00 dan Rp. 698.376.000,00 :

Nilai Aset Tetap-Tanah belum termasuk tanah di bawah jalan. Pemerintah Kabupaten Balangan tidak mencatat secara rinci berapa luas masing-masing ruas jalan pada KIB D sehingga luas tanah di bawah jalan belum dapat diketahui.

| | 31 Desember 2018 | 31 Desember 2017 |
|---------------------|------------------|------------------|
| | (Rp) | (Rp) |
| Peralatan dan Mesin | 1.085.725.700,- | 1.041.329.700,- |

Merupakan nilai peralatan dan mesin pada posisi per 31 Desember 2017 dan 2016, masing-masing adalah sebesar Rp. 1.085.725.700,- dan Rp. 1.041.329.700,- dengan perhitungan sebagai berikut:

| Uraian | 31 Desember 2018 (Rp) |
|--|--------------------------|
| Saldo Peralatan dan Mesin s/d Tahun 2017 | 1.041.329.700,- |
| - Koreksi tambah Saldo Awal | |
| - Koreksi kurang Saldo Awal | |
| Mutasi Peralatan dan Mesin Tahun 2018 | |
| - Belanja Modal | 44.396.000,- |
| - Belanja Pegawai | |
| - Belanja Barang & Jasa | |
| - Koreksi | |
| - Hilang | |
| Saldo Akhir per 31 Desember 2018 | 1.085.725.700,- |

| | 31 Desember 2018 | 31 Desember 2017 |
|---------------------|------------------|------------------|
| | (Rp) | (Rp) |
| Gedung dan Bangunan | 1.734.154.860,- | 1.719.154.860,- |

Merupakan nilai gedung dan bangunan pada posisi per 31 Desember 2018 dan 2017, masing-masing adalah sebesar Rp. 1.734.154.860,- dan Rp. 1.719.154.860,-dengan perhitungan sebagai berikut:

| Uraian | 31 Desember 2016 (Rp) |
|--|--------------------------|
| Saldo Gedung dan Bangunan s/d Tahun 2017 | 1.719.154.860,- |
| - Koreksi tambah Saldo Awal | |
| - Koreksi kurang Saldo Awal | |
| Mutasi Gedung dan Bangunan Tahun 2018 | |
| - Belanja Modal | |
| - Hibah | |
| - Mutasi dari SKPD lain | |
| - Belanja Pegawai | |
| - Belanja Barang & Jasa | |
| - Reklasifikasi dari KDP | |
| - Jalan, Irigasi dan Jaringan | 15.000.000,- |
| - KDP | |
| - Aset Lain-lain | |

| Saldo Akhir per 31 Desember 2018 | 1.734.154.860,- |
|----------------------------------|-----------------|
| - Penghapusan | |
| - Mutasi ke SKPD Lain | |

Akumulasi Penyusutan

| 31 Desember 2018 | 31 Desember 2017 |
|-------------------|-------------------|
| (Rp.) | (Rp.) |
| (1.427.931.302,-) | (1.427.931.302,-) |

Dari akumulasi penyusutan maka di tahun 2018 total penyusutan sebesar (Rp. 1.427.931.302,-) dan ditahun 2017 adalah sebesar (Rp. 1.427.931.302,-)

 31 Desember 2018
 31 Desember 2017

 (Rp)
 (Rp)

 Jumlah Aset Tetap
 2.107.683.958, 2.040.829.258,

Jumlah Aset Tetap per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp. 2.107.683.958,- sedangkan jumlah Aset Tetap per 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp. 2.040.829.258,-

31 Desember 2018 31 Desember 2017 (Rp) (Rp) (Rp)

Aset Lain-Lain 10.775.000,- 10.775.000,-

Merupakan pos yang digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Aset Tak Berwujud, Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan Perbendaharaan, Tuntutan Ganti Rugi, dan Kemitraan dengan Pihak Ketiga per 31 Desember 2018 dan 2017, masing-masing adalah sebesar Rp.10.775.000,- dan Rp. 10.775.000,-

31 Desember 2018 31 Desember 2017
(Rp) (Rp)

Jumlah Aset 2018 31 Desember 2017
(Rp) (Rp)
2.052.551.658,-

Jumlah Aset per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp. 2.117.676.231,- sedangkan jumlah Aset per 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp. 2.052.551.658,-

3.2.2. KEWAJIBAN

| 31 Desember 2018 | 31 Desember 2017 | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Over 1000) | (Rp) | (Rp)

Jumlah Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp 0,00 sedangkan jumlah Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp 0,00.

31 Desember 2018 31 Desember 2017 (Rp) (Rp)

| Hutang Bunga | 0,00 | 0,00 |
|--------------|------|------|

Merupakan saldo hutang biaya administrasi pinjaman yang akan jatuh tempo pada tahun berikutnya. Saldo Hutang Bunga Denda dan Commitment Fee per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah Nol (nihil).

| | 31 Desember 2018 | 31 Desember 2017 |
|--|------------------|------------------|
| | (Rp) | (Rp) |
| Bagian Lancar Hutang Kepada Pemerintah | 0,00 | 0,00 |
| Pusat | | |

Bagian Lancar Hutang Kepada Pemerintah Pusat merupakan bagian hutang kepada Pemerintah Pusat yang akan jatuh tempo dan diharapkan akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca. Saldo Bagian Lancar Hutang Kepada Pemerintah Pusat per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah Nol (nihil).

Merupakan saldo hutang beban pada posisi per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp.10.475.000,00 dan Per 31 Desember 2017 adalah Rp. 10.475.000,00

 Jumlah Kewajiban Jangka Pendek
 31 Desember 2018
 31 Desember 2017

 (Rp)
 (Rp)

 10.475.000,00
 10.475.000,00

Jumlah Kewajiban Jangka Pendek pada posisi per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp.10.475.000,00 dan Per 31 Desember 2017 adalah Rp. 10.475.000,00

 31 Desember 2018
 31 Desember 2017

 (Rp)
 (Rp)

 Kewajiban Jangka Panjang
 0,00

 0,00
 0,00

Jumlah Kewajiban Jangka Panjang per 31 Desember 2018 dan per 31 Desember 2017 adalah Nol (nihil).

Hutang Dalam Negeri – Pemerintah Daerah Lainya

31 Desember 2018
(Rp)

31 Desember 2017
0,00
0,00

Merupakan Hutang Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca. Saldo Hutang Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah Nol (nihil).

31 Desember 2018 31 Desember 2017 (Rp) (Rp)

| Jumlah Kewajiban | 10.475.000,00 | 10.475.000,00 |
|------------------|---------------|---------------|

Jumlah Kewajiban per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp. 10.475.000,00 sedangkan jumlah Kewajiban per 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp. 10.475.000,-

3.2.3. EKUITAS

| 31 Desember 2018 | 31 Desember 2017 |
|------------------|------------------|
| (Rp) | (Rp) |
| 2.042.076.658 | 2.042.076.658 - |

Jumlah Ekuitas per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp 2.042.076.658,- sedangkan jumlah Ekuitas per 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp 2.042.076.658,-

Merupakan kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Balangan yang berasal dari selisih antara aset lancar dengan kewajiban jangka pendek dengan rincian sebagai berikut:

| Uraian | 31 Desember 2018 (Rp) | 31 Desember 2017 (Rp) |
|---|--------------------------|--------------------------|
| Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) | | |
| Pendapatan yang Ditangguhkan | | |
| Cadangan Piutang | | |
| Cadangan Persediaan | | |
| Cadangan Aset Lancar Lainnya | | |
| Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang | | |
| Jangka Pendek | | |
| Jumlah | | |

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) per 31 Desember 2018 dan 2017 merupakan akumulasi SILPA tahun-tahun sebelumnya, yaitu:

| Uraian | 30Juni 2018 (Rp) | 31 Desember 2017 (Rp) |
|---------------------------------------|---------------------|--------------------------|
| SiLPA sampai dengan Tahun Sebelumnya | | |
| Koreksi SiLPA Tahun Sebelumnya | | |
| Hutang Perhitungan Pihak Ketiga | | |
| Penggunaan SiLPA/SiLPA Tahun Berjalan | | |
| Jumlah | | |

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) per 31 Desember 2018 dan 2017 tersebut terdiri dari:

| Uraian | 31 Desember 2018 (Rp) | 31 Desember 2017 (Rp) |
|---------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Kas di Kas Daerah | | |
| Kas di Bendahara Pengeluaran | | |
| Piutang Pihak Ketiga | | |
| Hutang Perhitungan Pihak Ketiga | | |
| Jumlah | | |

| | 31 Desember 2018 | 31 Desember 2017 |
|------------------------|------------------|------------------|
| | (Rp) | (Rp) |
| Ekuitas Dana Investasi | 0,- | 0,- |

Merupakan kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Balangan yang berasal dari selisih antara aset tidak lancar (tidak termasuk cadangan) dengan jumlah kewajiban jangka panjang dengan rincian sebagai berikut:

| Uraian | 31 Desember 2018 (Rp) | 31 Desember 2017 (Rp) |
|---|--------------------------|--------------------------|
| Diinvestasikan Dalam Investasi Jangka Panjang | | |
| Diinvestasikan Dalam Aset Tetap | | |
| Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya | | |
| Jumlah | | |

| | 31 Desember 2018 | 31 Desember 2017 |
|-------------------------|------------------|------------------|
| | (Rp) | (Rp) |
| . Ekuitas Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 |

Merupakan kekayaan pemerintah yang dicadangkan untuk tujuan tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Akun ini merupakan akun lawan dari dana cadangan. Saldo Ekuitas Dana Cadangan per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah Nol (nihil).

| | 31 Desember 2018 | 31 Desember 2017 |
|---------------------|------------------|------------------|
| | (Rp) | (Rp) |
| Jumlah Ekuitas Dana | 2.042.076.658- | 2.042.076.658- |

Jumlah Ekuitas Dana per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp 2.042.076.658- sedangkan jumlah Ekuitas Dana per 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp 2.042.076.658-

Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana

| 31 Desember 2018 | 31 Desember 2017 |
|------------------|------------------|
| (Rp) | (Rp) |
| 2.052.551.658,- | 2.052.551.658,- |

Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp 2.052.551.658,-sedangkan per 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp 2.052.551.658,-

3.2.1 PENDAPATAN – LO

3.3.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) – LO

| | Anggaran TA 2018 | Realisasi TA 2018 | Realisasi TA 2017 |
|------------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | (Rp) | (Rp) | (Rp) |
| Pendapatan Asli Daerah | 1.000.000,- | 0,- | 0,- |
| T 0 | | | |

- LO

Realisasi Pendapatan untuk TA 2018 sebesar Rp 0,- atau 0% dari anggaran sebesar Rp 1.000.000,- Sedangkan realisasi Pendapatan untuk TA 2017 adalah sebesar Rp 0,-

| | Anggaran TA 2018 | Realisasi TA 2018 | Realisasi TA 2017 |
|--------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | (Rp) | (Rp) | (Rp) |
| Pajak Daerah | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Merupakan realisasi PAD dari Pajak Daerah. Realisasi Pendapatan Pajak Daerah untuk TA 20178 sebesar Rp 0,00 atau 0,00% dari anggaran sebesar Rp 0,00, sedangkan realisasi Pendapatan Pajak Daerah untuk TA 2017 sebesar Rp 0,00. Rincian anggaran dan realisasi tahun 2018 serta realisasi tahun 2017 adalah sebagai berikut:

| | Anggaran TA 2018 | Realisasi TA 2018 | Realisasi TA 2017 |
|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | (Rp) | (Rp) | (Rp) |
| Retribusi Daerah | 1.000.000,- | 0,- | 0,- |

Merupakan realisasi PAD dari Retribusi Daerah. Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Kabupaten Balangan untuk TA 2018 sebesar Rp 0,00 atau 0% dari anggaran sebesar Rp 1.000.000,00. Sedangkan realisasi Pendapatan Retribusi Daerah untuk TA 2017 sebesar Rp 0,-. Rincian anggaran dan realisasi tahun 2018 serta realisasi tahun 2018 adalah sebagai berikut:

| Uraian | Anggaran 2018 (Rp) | Realisasi 2018 (Rp) | Realisasi 2017 (Rp) |
|--------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|
| R. Pelayanan Pasar | 0,- | 0,- | 0,- |
| R. Izin Mendirikan Bangunan | 1.000.000,- | 0,- | 0,- |
| R. Sampah | 0,- | 0,- | 0,- |
| Jumlah | 1.000.000,- | 0,00 | 0,00 |

| | Anggaran TA 2018 | Realisasi TA 2018 | Realisasi TA 2017 |
|--|------------------|-------------------|-------------------|
| | (Rp) | (Rp) | (Rp) |
| Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dinisahkan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Merupakan realisasi PAD yang berasal dari Investasi pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) berupa deviden/laba usaha dan dana pembangunan yang dibagikan dari Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan. Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan untuk TA 2018 sebesar Rp 0,00 atau 0,00% dari yang anggaran sebesar Rp 0,00. Sedangkan realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan untuk TA 2017 sebesar Rp 0,00.

| | Anggaran TA 2018 | Realisasi TA 2018 | Realisasi TA 2017 |
|--------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | (Rp) | (Rp) | (Rp) |
| Lain-Lain PAD yang | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sah | | | |

Merupakan realisasi PAD dari berbagai sumber yang bersifat tidak tetap (tidak rutin). Realisasi Lain-Lain PAD yang Sah untuk TA 2018 sebesar Rp 0,00 atau 0,00% dari anggaran sebesar Rp 0,00. Sedangkan realisasi Lain-Lain PAD yang Sah untuk TA 2016 sebesar Rp 0,00. Rincian anggaran dan realisasi tahun 2018 serta realisasi tahun 2017 adalah sebagai berikut:

| Uraian | Anggaran 2018 Rp | Realisasi 2018 Rp | Realisasi 2017 Rp |
|--------|------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Jumlah | | | |

PENDAPATAN TRANSFER - LO

| | Anggaran TA 2018 | Realisasi TA 2018 | Realisasi TA 2017 |
|---------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | (Rp) | (Rp) | (Rp) |
| Pendapatan Transfer | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Realisasi Pendapatan Transfer untuk TA 2018 adalah sebesar Rp 0,00 atau 0,00% dari anggaran sebesar Rp 0,00. Sedangkan realisasi Pendapatan Transfer untuk TA 2017 adalah sebesar Rp 0,00.

| | Anggaran TA 2018 | Realisasi TA 2018 | Realisasi TA 2017 |
|---------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | (Rp) | (Rp) | (Rp) |
| Transfer Pemerintah | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pusat - Dana | | | |

Perimbangan

Realisasi Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan untuk TA 2018 adalah sebesar Rp 0,00 atau 0,00% dari anggaran sebesar Rp 0,00. Sedangkan realisasi Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan untuk TA 2017 adalah sebesar Rp 0,00.

3.3.1. BEBAN

| | Realisasi TA 2018 | Realisasi TA 2017 |
|--------------------|-------------------|-------------------|
| | (Rp) | (Rp) |
| Beban Pegawai - LO | 1.270.279.362,- | 1.099.902.144,- |

Realisasi Belanja Pegawai untuk TA 2018 adalah sebesar Rp 1.270.279.362,-. Sedangkan realisasi Belanja Pegawai untuk TA 2017 adalah sebesar Rp 1.099.902.144,-

| | Realisasi TA 2018 | Realisasi TA 2017 |
|-----------------------|-------------------|-------------------|
| | (Rp) | (Rp) |
| Beban Barang dan Jasa | 1.611.029.931,- | 1.201.651.300,- |

Merupakan realisasi belanja untuk pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah. Realisasi untuk TA 2018 sebesar Rp 1.611.029.931,- Sedangkan realisasi Belanja Barang untuk TA 2017 sebesar Rp 1.201.651.300,-

| | Realisasi TA 2018 | Realisasi TA 2017 |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| | (Rp) | (Rp) |
| Beban Penyusutan dan | 0,- | 253.964.221,- |
| Amortisasi | | |

Merupakan beban penyusutan atas belanja peratan dan mesin.

| | Realisasi TA 2018 | Realisasi TA 2017 |
|------------------------------|-------------------|-------------------|
| | (Rp) | (Rp) |
| Surplus/Defisit dari operasi | (2.881.309.293,-) | (2.555.517.665,-) |

Realisasi Surplus/Defisit untuk TA 2018 adalah sebesar Rp (2.881.309.293,-) Sedangkan realisasi Surplus/Defisit untuk TA 2017 adalah sebesar Rp (2.555.517.665,-)

3.3.2. KEGIATAN NON OPERASIONAL

| | Realisasi TA 2018 | Realisasi TA 2017 |
|-------------------------|-------------------|-------------------|
| | (Rp) | (Rp) |
| Surplus/Defisit sebelum | (2.881.309.293,-) | (2.555.517.665,-) |
| pos luar biasa | | |

Realisasi Surplus/Defisit untuk TA 2018 adalah sebesar Rp (2.881.309.293,-). Sedangkan realisasi Surplus/Defisit untuk TA 2017 adalah sebesar Rp (2.555.517.665,-)

3.3.3. POS LUAR BIASA

| | Realisasi TA 2018 | Realisasi TA 2017 |
|--------------------------|-------------------|-------------------|
| | (Rp) | (Rp) |
| Surplus/Defisit dari pos | 00,- | 00,- |
| luar biaca | | |

Realisasi Surplus/Defisit untuk TA 2018 adalah sebesar Rp 00,-. Sedangkan realisasi Surplus/Defisit untuk TA 2017 adalah sebesar Rp 00,-

Realisasi TA 2018 (Rp) (Rp)
Surplus/Defisit - LO (1.448.864.041,-) (2.555.517.665,-)

Realisasi Surplus/Defisit untuk TA 2018 adalah sebesar Rp (1.448.864.041,-) Sedangkan realisasi Surplus/Defisit untuk TA 2017 adalah sebesar Rp (2.555.517.665,-)

3.4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE)

3.4.1. EKUITAS AWAL

Jumlah Ekuitas Awal per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp 2.042.076.658,- sedangkan jumlah Ekuitas per 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp 1.272.831.779,-

3.4.2. SURPLUS/DEPISIT – LO

 Realisasi TA 2018
 Realisasi TA 2017

 (Rp)
 (Rp)

 Surplus/Defisit - LO
 (2.947.216.593,-)
 (2.555.517.665,-)

Realisasi Surplus/Defisit untuk TA 2018 adalah sebesar Rp (2.881.309.293,-) Sedangkan realisasi Surplus/Defisit untuk TA 2017 adalah sebesar Rp (2.555.517.665,-)

3.4.3. DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR

| 31 Desember 2018 | 31 Desember 2017 | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Sp) | (Sp)

Jumlah Koreksi Ekuitas – Aset Tetap per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp 0,- sedangkan jumlah per 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp 698.376.000,-

3.4.4. KEWAJIBAN UNTUK DIKONSOLIDASIKAN

| 31 Desember 2018 | 31 Desember 2017 |
|------------------|------------------|
| (Rp) | (Rp) |
| 2.947.216.593,- | 2.626.386.544,- |

Jumlah Kewajiban untuk dikonsolidasikan per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp.2.947.216.593,- sedangkan jumlah per 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp 2.626.386.544,-

3.4.4. EKUITAS AKHIR

| 31 Desember 2018 | 31 Desember 2017 |
|------------------|------------------|
| (Rp) | (Rp) |
| 2.042.076.658,- | 2.042.076.658,- |

Jumlah EkuitasAkhir per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp 2.042.076.658,- sedangkan jumlah Ekuitas Akhir per 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp 2.042.076.658,-

BAB IV

4.1. PENUTUP

Di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, terdapat penegasan di bidang pengelolaan keuangan, yaitu bahwa kekuasaan pengelolaan keuangan negara adalah sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan, dan kekuasaan pengelolaan keuangan negara dari presiden sebagian dilimpahkan kepada gubernur/bupati/walikota selaku kepala pemerintahan daerah. Ketentuan tersebut berdampak pada pengaturan pengelolaan keuangan daerah, yaitu bahwa gubernur/bupati/walikota bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan daerah sebagai bagian dari pemerintahan daerah.

Untuk memenuhi ketentuan tersebut, Laporan Keuangan Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2018 disusun dan disajikan sebagai media pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018.

Sebagai penutup dapat disimpulkan bahwa dalam pengelolaan keuangan Kecamatan Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2018 telah terjadi pengurangan dari realisasi penerimaan pendapatan daerah dari target yang ditetapkan dan terjadi efisiensi pengeluaran belanja daerah, selain itu LKKJ Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2018 ini sudah disusun dan disajikan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005.

Penyusunan dan penyajian LK (Kecamatan Tebing Tinggi) Tahun Anggaran 2018 ini masih melalui proses konversi, mengingat masih adanya perbedaan struktur APBD menurut ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalan Negeri Nomor 13 Tahun 2006. Pelaksanaan Konversi mengacu kepada pedoman konversi sebagaimana diatur dalam Buletin Teknis yang diterbitkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP), dimana buletin teknis merupakan bagian dari SAP. Konversi tidak terbatas pada format pelaporan, namun juga diupayakan agar definisi setiap pos laporan keuangan memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam Standar Akuntansi Pemerintahan.

PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk Tahun 2018 dan 2017 Kecamatan Tebing Tinggi

Secara singkat dapat disimpulkan bahwa Laporan Keuangan Kecamatan Tebing Tinggi Semester I Tahun 2018 dari Pendapatan ditargetkan sebesar Rp 1.000.000,- direalisasikan sebesar Rp0,- atau 0%. Belanja dianggarkan sebesar Rp. 3.198.000.776,- direalisasikan sebesar Rp.2.947.216.593,- atau 92,16%. Pengeluaran Pembiayaan dianggarkan sebesar Rp. (3.197.000.776,-) direalisasikan sebesar Rp.(2.947.216.593,-) atau 92,19%. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran sebesar Rp. (3.197.000.776,-) direalisasikan sebesar Rp.(2.947.216.593,-) atau 92,19%.

Dengan ditemuinya berbagai kendala dalam pengelolaan keuangan daerah selama Tahun Anggaran 2018 ini, Pemerintah Kabupaten Balangan bertekad untuk terus selalu meningkatkan kualitas sistem pengelolaan keuangan daerah, baik dari sisi penyempurnaan aturan maupun dari sisi peningkatan kapasitas sumber daya aparatur pengelola keuangan daerah.

Demikian laporan keuangan Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2018 ini kami sajikan semoga mendapatkan Ridho dari Allah S.W.T Amin.

Tebing Tinggi, 07 Januari 2018
PENGGUNA ANGGARAN

AGUS ZAIDAN, S.Pd Pembina Tk.I / IV b NIP. 19680813 199303 1 009